

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MENUJU PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ananda Yayang Praduta

NPP. 31.0647

*Asal Pendaftaran Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

E-mail: ap1709@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Meltarini, M. Si

ABSTRACT

Background: Political participation of young voters is a key element in maintaining democracy stability in Indonesia. **Purpose:** This research aims to examine the strategies used by the General Election Commission (KPU) of Kutai Kartanegara Regency in enhancing the political participation of young voters ahead of the 2024 General Election. **Methods:** A qualitative descriptive method is employed to understand this phenomenon holistically and using descriptive data. **Result:** Through collaboration with local government agencies and educational institutions, the KPU of Kutai Kartanegara Regency has implemented various strategies, including socialization in schools, the establishment of Election Classes, and the utilization of social media. However, there are several inhibiting factors such as political ideologies, influence of public opinion, dissemination of unclear information, as well as funding and political knowledge issues. **Conclusion:** This research is expected to contribute to understanding the efforts of the KPU in enhancing the political participation of young voters and provide insights for further strategy development.

Keywords: *General Election Commissions, Politics, Strategy*

ABSTRAK

Latar Belakang: Partisipasi politik pemilih pemula menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula menjelang Pemilihan Umum 2024. **Metode:** Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tersebut secara holistik dan dengan menggunakan data deskriptif. **Hasil:** Melalui kerjasama dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga pendidikan, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi di sekolah-sekolah, pembentukan Kelas Pemilu, dan pemanfaatan media sosial. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat seperti ideologi politik, pengaruh opini publik, penyebaran informasi yang tidak jelas, serta masalah dana dan pengetahuan politik yang kurang. **Kesimpulan:** Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dan memberikan pandangan untuk pengembangan strategi selanjutnya.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Politik, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dimana kehidupan politiknya sangat dinamis. Salah satu bentuk dari sebuah negara demokrasi ialah adanya pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan. Pemilu adalah sebuah bentuk implementasi dari sistem demokrasi melalui penerapan sila keempat Pancasila Pasal 1 (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” yang menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan pemilu. Asas penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Partisipasi adalah bagian penting dari pelaksanaan demokrasi karena merupakan cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan menggunakan hak mereka untuk memilih calon pemimpin. Keikutsertaan masyarakat ini harus terus ditingkatkan karena masih ada banyak orang yang tidak mau menggunakan hak pilih mereka atau berpartisipasi dalam demokrasi negeri ini. Keikutsertaan politik sangat penting untuk stabilitas masyarakat karena jika pemimpin yang dipilih tidak sejalan dengan pilihan masyarakat, mereka pasti akan merasa bahwa pemerintahan yang di jalankan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan dan akan menimbulkan sebuah masalah seperti tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini yang harus di hindari dengan keaktifan masyarakat dalam pesta demokrasi. partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum (Herbert McClosky).

Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan umum, yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu adalah pesta demokrasi di mana orang memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka untuk mewakili keinginan mereka dan membangun pemerintahan yang baik. Secara umum, pemilihan harus dilakukan secara demokratis dengan memastikan bahwa pemilihan itu dilakukan dengan jujur dan adil serta memberikan rasa aman kepada pemilih agar mereka tidak takut. Pemilihan adalah cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat, di mana rakyat berperan penting dalam menjalankan pemilu untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengembangkan gagasan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik peserta pemilihan umum dan wakil pemerintah. KPU merupakan sebuah lembaga yang berperan untuk menyelenggarakan pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri sehingga KPU merupakan lembaga independen yang berdiri sendiri tanp bergantung dengan lembaga lain agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara adil dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Dalam pelaksanaannya KPU memiliki beberapa tugas yang telah di atur oleh Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pemilihan Umum, adapun tugasnya di antara lain

1. Merencanakan anggaran serta program dan menetapkan jadwal pelaksanaannya.
2. Menyusun struktur organisasi tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN dan KPPSLN.
3. Menyusun peraturan KPU dalam pelaksanaan pemilu, mengkordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan pemilu,
4. Menerima daftar hadir pemilih dari KPU Provinsi.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan.

6. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara.
7. Mengumumkan calon anggota legislatif dan pasangan calon terpilih dan membuat berita acaranya.
8. Melakukansosialisasi terhadap pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serta menyusun laporan pelaksanaan pemilu.
10. Melaksanakan tugas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tanggung jawab tersebut, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara harus berupaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan cara profesional dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu membina hubungan yang baik antara masyarakat, KPU, TNI/POLRI, dan pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan harapan masyarakat. Bab IV, Pasal 198 (Ayat 1) dari UU Pemilu menetapkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah, dan memiliki hak untuk memilih dan sebelumnya belum termasuk sebagai pemilih karena ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu. Sangat penting bagi pemilih pemula untuk mengambil bagian dalam pemilihan, tetapi sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak memahami politik dan hanya tertarik untuk memilih pemimpin. Golput, atau golongan putih, terus dilecehkan oleh masyarakat karena tidak mau memilih pemimpin, sebagai akibat dari banyaknya berita bohong tentang calon pemimpin yang disebar oleh individu yang tidak mereka sukai. Ini menjadi tantangan bagi KPU untuk memberikan sosialisasi tentang pemilihan umum.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu Kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tenggarong. Luas dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 27.263 km². Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri terdiri dari 18 Kecamatan, 44 Kelurahan, dan 193 Desa dengan jumlah penduduk yang mencapai 734.485 orang pada tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Jl. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong. Salah satu misi yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Sukses atau tidaknya pemilihan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara di pengaruhi oleh kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri. Maka dari itu komisi pemilihan umum juga berkewajiban untuk melakukan strategi peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Pada pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 jumlah daftar pemilih di Kecamatan Sanga-Sanga mencapai 12.459 orang dengan keterangan 6.371 orang laki-laki dan 6.088 orang perempuan. Di kecamatan Kota Bangun jumlah pemilihnya mencapai 25.017 orang dengan keterangan 13.062 orang laki-laki dan 11.955 orang perempuan. Di kecamatan Samboja daftar pemilih mencapai 43.055 orang dengan keterangan 22.242 orang laki-laki dan 20.813 orang perempuan. Tiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang akan menjadi objek penelitian karena tiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang termasuk banyak seperti Kecamatan Kota Bangun yang pada Tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.655 jiwa, Kecamatan Samboja pada Tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 66.617 jiwa dan di Kecamatan Sanga-Sanga pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 19.728 jiwa namun di ketiga kecamatan tersebut memiliki jumlah partisipasi politik yang termasuk sedikit di Kabupaten Kutai kartanegara.

Tabel 1. 1
DPT PEMILU Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	DPT		
		L (orang)	P (orang)	Jumlah (orang)
1	Sanga-Sanga	6.371	6.088	12.459
2	Samboja	22.242	20.813	43.055
3	Kota Bangun	13.062	11.955	25.017

Sumber : *jdid.kpu.go.id*

Jumlah pemilih di 18 Kecamatan ini cukup rendah di bandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut , jika mereka tidak menyalurkan suaranya maka angka partisipasi memilih di Kutai Kartanegara dipastikan tidak mencapai target, sebagaimana dapat dilihat

Tabel 1. 2
Daftar Pemilih Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Pemula
1	Muara Muntai	756
2	Loa Kulu	1.12
3	Loa Janan	3.347
4	Anggana	1.478
5	Muara Badak	894
6	Tenggarong	3.964
7	Sebulu	1.562
8	Kota Bangun	875
9	Kenohan	950
10	Kembang Janggut	2.239
11	Muara Kaman	2.451
12	Tabang	560
13	Samboja	756
14	Muara Jawa	2.167
15	Sanga-Sanga	864
16	Tenggarong Seberang	5.12
17	Marang Kayu	1.341
18	Muara Wis	550

Sumber : *KPU Kabupaten Kutai Kartanegara*

Oleh karena itu pemilih pemula diharapkan wajib menggunakan hak suara dengan benar sebab mereka juga memiliki tanggung jawab atas kebijakan pembangunan lima tahun kedepan. Pemilih pemula juga diharapkan cerdas memilih pemimpin dan tidak terkontaminasi dengan

praktik politik uang. Untuk tahun 2019 remaja di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tergolong apatis kepada politik yang ada di Indonesia, sehingga partisipasi dari para pemilih pemula masih sangat rendah sehingga hal ini yang membuat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya untuk dapat meningkatkan partisipasi para pemilih pemula di Tahun 2024 ini. Pemilih pemula sangat mudah untuk di pengaruhi oleh para pelaku politik karena masih banyak pemilih pemula yang sangat mudah untuk di berikan janji-janji politik. Rasa keingintahuan yang tinggi dari pemilih pemula membuat anggapan bahwa mereka harus memberikan suaranya di dalam pemilu. Di umur awal mereka mendapatkan kesempatan untuk memberikan suaranya, pasti mereka sangat antusias untuk memilih, tetapi tidak semua pemilih pemula memiliki pendidikan politik yang memadai sehingga kebanyakan dari mereka memilih sesuai dengan pilihan para orang tua atau orang yang sudah sering mengikuti pemilu.

Menurut Peraturan KPU No.10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa seorang pemilih pemula merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan sudah kawin atau sudah pernah menikah. Sebagai seorang pemilih pemula pastinya mereka belum memiliki pengalaman mengenai bagaimana cara melakukan pemilihan terhadap calon pemimpin, dengan keterbatasan pengalaman yang dimiliki bukan berarti itu menjadi sebuah penghalang mereka untuk tidak melakukan voting dalam pesta demokrasi.

Karena mereka masih dalam posisi yang tidak stabil dan mudah dipengaruhi oleh para pelaku politik, pemilih pemula merupakan indikator penting dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus memberikan sosialisasi atau materi politik tersebut. Tidak mudah untuk meningkatkan partisipasi politik melalui pemilihan. Semua pihak bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat, bukan hanya KPU. Hambatan di setiap daerah pasti berbeda-beda, KPU harus dapat memahami situasi yang sedang dihadapi. KPU pasti akan menghadapi banyak masalah saat menyambut Pemilihan Umum pada tahun 2024. Seperti yang di ucapkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo melalui rekaman video pendek pada Seminar Program Pendidikan Reguler 63 di Lemhannas RI beliau menyebut bahwa “Banyak tantangan- tantangan yang dihadapi dalam melahirkan pemilu yang berkualitas ini, seperti masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masa kampanye,”

Salah satu tantangan yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu partisipasi pemilih, pada tahun 2019 KPU Kutai Kartanegara menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 473.702 orang, sedangkan pada pemilu tahun 2014 Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 509.763 orang yang terdiri atas 272.737 laki-laki dan 237.026 perempuan. terjadinya penurunan dari para pemilih yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga faktor ini lah yang akan menjadi bahan penelitian oleh penulis dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”

1.2. Kesenjangan Masalah

Pemilih pemula diharapkan wajib menggunakan hak suara dengan benar sebab mereka juga memiliki tanggung jawab atas kebijakan pembangunan lima tahun kedepan. Pemilih pemula juga diharapkan cerdas memilih pemimpin dan tidak terkontaminasi dengan praktik politik uang. Untuk tahun 2019 remaja di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tergolong apatis kepada politik yang ada di Indonesia, sehingga partisipasi dari para pemilih pemula masih sangat rendah sehingga hal ini yang membuat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya untuk dapat meningkatkan partisipasi para pemilih pemula di Tahun 2024 ini. Pemilih pemula sangat mudah untuk di pengaruhi oleh para pelaku politik karena masih banyak pemilih pemula yang sangat mudah untuk di berikan janji-janji politik. Rasa keingintahuan yang tinggi dari pemilih pemula membuat anggapan bahwa mereka harus memberikan suaranya di dalam pemilu. Di umur awal mereka mendapatkan kesempatan untuk memberikan suaranya, pasti mereka sangat antusias untuk memilih, tetapi tidak semua pemilih pemula memiliki pendidikan politik yang memadai sehingga kebanyakan dari mereka memilih sesuai dengan pilihan para orang tua atau orang yang sudah sering mengikuti pemilu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Lestari (2019) dengan judul skripsi “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang”. dapat disimpulkan bahwa didalam strategi tersebut ditemukan 3 indikator strategi pertama yaitu tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menentukan kejelasan strategi dan tujuan ataupun target jangka panjang yang harus tercapai, kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kabupaten Pinrang telah berupaya memaksimalkan strategi peningkatan partisipasi politik pemilih pemula dengan melakukan sosialisasi dan pemaparan akan pentingnya pemilu dan penggunaan hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan daerahnya, yang ketiga yaitu alokasi sumber daya dalam tahap ini terkhusus untuk relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik dikarenakan masih banyak diantara mereka yang belum paham tugas dan fungsinya akan tetapi dalam hal ini KPU upaten Pinrang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja para relawan demokrasi ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan, tahun penelitian dan penelitian ini lebih khusus meneliti tentang strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula bukan hanya masyarakat secara umum saja. Penelitian yang dilakukan oleh Roro Ayu Wulansari (2023) tentang “Strategi KPU Kabupaten Pringsewu Dalam Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024” menyebutkan Studi ini menemukan bahwa strategi KPU Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 akan menggunakan strategi yang dianut oleh Chandler (dalam Salusu 2015:64), yang mencakup pembuatan jangka panjang, seperti menentukan metode, tujuan, dan sasaran kegiatan membangun kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi pemilih, memastikan bahwa data pemilih telah diperbarui secara nyata, koordinasi dengan partai politik, dan untuk memperbaiki sistem pemilu). Pemilihan tindakan seperti penambahan TPS, pengelolaan DPT melalui aplikasi ecoclit, penambahan TPS, sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan pembagian sumber daya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat memberikan pemahaman dan pemahaman penyelenggara pemilu di semua tingkatan, pemerintah daerah, dan partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Ardiansyah tentang “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

strategi, hambatan, dan upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi berikut digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 di Kabupaten Tebo yaitu 1) Penguatan, 2) Rasionalisasi, 3) Bujukan, dan 4) Konflik. Salah satu kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Tebo dalam melaksanakan sosialisasi politik kepada masyarakat pada Pemilihan Tahun 2020 adalah (1) Pandemi virus COVID-19 (2) Kurangnya dukungan keuangan untuk sosialisasi. (3) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. (4) Kekurangan sumber daya.

Berdasarkan penelitian Rizki Kurniawan, dkk. (2023) dengan judul “Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024”, strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilu 2024. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pemilih muda yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan temuan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan berbagai strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilu 2024, di antaranya Memanfaatkan platform media sosial, Melaksanakan program edukasi, Bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Serupa dengan penelitian Rizki Kurniawan, dkk. (2023), Zakiruddin dan Lestari (2023) turut memberikan gambaran tentang strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di era post-truth dalam jurnalnya yang berjudul “Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”. Strategi-strategi tersebut dapat diadopsi oleh KPU di daerah lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu mendatang, yakni melalui meningkatkan edukasi politik, Memanfaatkan media sosial, dan melibatkan pemangku kepentingan Berkenaan dengan pemanfaatan media sosial, dapat diambil contoh pada "Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial pada Pemilihan Umum 2019" yang diteliti oleh Dila Novita, dkk. (2023) dinilai masih belum cukup maksimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam mengelola media sosial, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran. Adapun yang perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas komunikasi publik melalui media sosial tersebut ialah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola media sosial, menambah sumber daya manusia untuk mengelola media sosial, dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan komunikasi publik melalui media sosial. Penelitian berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” oleh Megawati dan Andi Tenri (2020) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui: 1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai tingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS; 2) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada; 3) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (face to face), Training Of Trainer,

dan Rumah Pintar Pemilu. Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula diantaranya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif.. Jurnal dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus : Kecamatan Kuta Selatan, Badung)” oleh Gracella, dkk. (2024) menunjukkan keberhasilan yang dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi politik di kabupaten badung jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. masyarakat kecamatan kuta selatan telah memahami tentang pemilu hanya saja untuk masyarakat yang berasal dari luar wilayah kuta selatan beberapa masih enggan untuk mengurus perpindahan tps. rekomendasi dari penelitian ini adalah kpu kabupaten badung dapat mempromosikan kampanye yang berfokus pada isu relevan bagi masyarakat, lalu memberikan pelatihan untuk jajaran pps dan kpps, melakukan evaluasi sistem yang digunakan saat penghitungan suara, dan memastikan transparansi tahapan pemilu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kpu dan pemilu.

Dalam jurnal yang berjudul “Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” oleh Yohana Simbolon (2019)”, dikatakan bahwa Pemkab Toba Samosir melaksanakan strategi komunikasi dengan mengadakan kelas pemilihan yang pesertanya berasal dari sekolah dan kampus mana saja. Namun, masih belum berjalan dengan baik dan sangat disayangkan kehadiran Rumah Pintar Pemilu (RPP) seolah hanya sekedar formalitas saja dikarenakan tuntutan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) padahal ide ini merupakan salah satu ide baik. Penelitian Rosana dan Data (2024) dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak 2024” mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menjalankan strateginya dengan cara sosialisasi kepada pemilih pemula terutama dikalangan SMA dan Universitas yang diadakan oleh KPU Provinsi Riau serta melakukan simulasi pencoblosan yang dilakukan langsung oleh para siswa/siswi maupun mahasiswa/i agar mereka mengetahui alur tahapan pencoblosan. KPU Provinsi Riau juga memberikan sosialisasi melalui sosial media mereka dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau informasi terbaru tentang pemilu serentak tahun 2024.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan inovatif dalam strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula menjelang Pemilihan Umum 2024, melalui penerapan metode deskriptif kualitatif. Dengan memanfaatkan sosialisasi di sekolah, pembentukan Kelas Pemilu, dan penggunaan media sosial, penelitian ini mengidentifikasi hambatan seperti ideologi politik, pengaruh opini publik, dan keterbatasan dana serta pengetahuan politik. Hasilnya memberikan kontribusi signifikan dalam menyempurnakan strategi KPU. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi temuan dari studi sebelumnya seperti pentingnya formulasi strategi (Lestari, 2019), pendidikan politik (Wulansari, 2023), tantangan finansial (Ardiansyah, 2020), dan digitalisasi strategi komunikasi (Kurniawan et al., 2023; Zakiruddin & Lestari, 2023) untuk mengembangkan

pendekatan holistik yang lebih adaptif dan efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

1.5. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menuju pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukannya,

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif di mana metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018). Adapun sumber data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang terkait dengan masalah ini, data yang berhubungan dengan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menuju pemilu 2024. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber data kedua yang relevan untuk menjawab fokus tentang peran KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap partisipasi politik masyarakat antara lain data media yang digunakan, data pelaksanaan program, data inovasi yang akan di berikan, data tempat kegiatan, data tentang pelaku kegiatan, data berkenaan dengan sasaran kegiatan, dan data berkenaan pada alasan terlaksananya kegiatan tersebut. Adapun penentuan informan pada penelitian ini dilaksanakan secara *purposive* pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kepala Bidang Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, serta *snowball sampling* pada masyarakat umum yang berjumlah 10 orang informan dan mahasiswa atau Siswa SMA yang berjumlah 15 orang informan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yaitu, observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data akan dianalisis untuk di hubungkan dengan teori dan konsep serta situasi di lapangan. Setelah analisis ini selesai, hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peneliti akan menggunakan analisis SWOT untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula (Rangkuti, 2013)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

1. Fomulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dalam formulasi dan sasaran jangka panjang KPU Kabupaten Kutai Kartanegara banyak melakukan perencanaan mulai dari sosialisasi ke berbagai sekolah yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satunya ada di SMK Negeri 1 Tenggarong yang dilakukan oleh KPU dengan menghadirkan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara agar para pemilih pemula dapat memahami betapa pentingnya memberikan hak suara pada proses pemilu yang akan di laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Selain itu KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga memnbuat sebuah Kelas Pemilu yang dimana program ini di inisiasi oleh KPU dengan mengundang perwakilan siswa dari setiap SMA di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga KPU melibatkan para mahasiswa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Universitas Kutai Kartanegara, mereka di undang sebagai pembicara mengenai politik dan demokrasi kepada para siswa dan siswi di kelas pemilu tersebut. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga melibatkan beberapa media social agar dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi penting mengenai pemilu yang akan di lakukan. Adapun KPU Kukar mempunyai beberapa media sosial seperti Facebook, website KPU, twitter, JDIH dan *Instagram*. Namun pihak KPU menyampaikan bahwa mereka lebih aktif dalam media sosial *Instagram* dengan memberikan konten-konten yang edukatif kepada masyarakat dan juga menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU menjelang pemilu.

Dalam penetapan kekuatan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan sebuah pemilihan umum tentu memiliki beberapa kekuatan yang mendukung segala proses pemilu dimana kekuatan tersebut akan menjadi faktor penting agar pemilu berjalan dengan baik. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri memiliki sebuah regulasi yang mengatur tentang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peraturan ini menjadi salah satu pedoman yang harus di lakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan proses pemilihan umum. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki sumber daya manusia, dana, serta sarana dan prasarana yang mampu mendukung segala kegiatan KPU untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum di Tahun 2024. Mengenai regulasi yang sudah di atur, menurut KPU Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa regulasi tersebut masih relevan dan masih menjadi pedoman bagi KPU itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu, seperti seperti (a)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; (b)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (c)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (d)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (e)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang; (f)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden; (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; (i) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum; (k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; (l) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (m) Keputusan KPU No. 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; (n) Keputusan KPU No.156 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; (o) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan (p) PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Untuk menjalankan segala aturan itu harus di dukung dengan adanya sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dari jumlah anggota hingga kompetensi harus mampu berjalan bersamaan dengan aturan dan program yang telah di siapkan untuk menyukseskan pemilu tahun 2024.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula, dalam Pemilu 2024. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, serta mengadakan Kelas Pemilu. KPU juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan pendidikan politik.

KPU memiliki beberapa kekuatan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, seperti regulasi yang jelas, sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana. Namun, KPU juga memiliki beberapa kelemahan, seperti jarak tempuh yang jauh untuk sosialisasi, apatisme masyarakat, dan sumber daya manusia yang belum memadai.

KPU memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan partisipasi pemilih, seperti pemanfaatan media sosial, kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi, dan peningkatan kualitas SDM. Namun, KPU juga menghadapi beberapa ancaman, seperti pandangan politik sendiri, opini publik, berita bohong, dan kesulitan menyebarkan informasi di daerah terpencil. KPU terus berupaya meminimalisir ancaman ini untuk memastikan kelancaran Pemilu 2024.

2. Pemilihan Tindakan

Dalam pemilihan tindakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara ini melakukan eksekusi dalam program yang sudah direncanakan mengenai pembentukan sebuah kelas demokrasi yang akan di isi oleh para perwakilan sebanyak 10 orang dari SMA-SMA yang ada di Kabupaten Kukar dan mengajak para mahasiswa sebagai pembicara mengenai politik dan demokrasi. Segala materi akan di berikan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini materi yang berikan oleh KPU dan Badan Kesbangpol adalah mengenai betapa pentingnya para kaum muda

untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi yang di laksanakan pada 14 Februari 2024. Untuk tahun ini program seperti relawan demokrasi tidak di adakan oleh KPU kabupaten Kutai Kartanegara sehingga KPU sendiri yang harus melakukan kegiatan sosialisasi ke berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan harus melewati beberapa hambatan yang ada seperti infrastruktur jalan yang kurang baik, jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, kondisi internet yang tidak stabil di beberapa kecamatan, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Hal ini dilakukan oleh KPU mengingat bahwa pentingnya suara para pemilih pemula dalam pesta demokrasi. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan sebuah program yaitu Kirab Pemilu yang dilaksanakan pada bulan 10-17 April 2023 untuk memperkenalkan kepada warga Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa mengikuti sebuah pesta demokrasi itu merupakan sebuah kewajiban agar dapat terpilihnya sebuah pemimpin Negara yang sesuai dengan harapan masyarakat dan mamapu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Di Taman Kota Raja Tenggarong, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Firman Hidayat, menyerahkan estafet bendera Kirab Pemilu kepada Ketua KPU Kukar Bapak Poernomo, S.H.I.

Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR,DPRD,DPD akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. KPU di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota sedang mempersiapkan segala bentuk program agar kegiatan pemilu serentak tahun 2024 ini dapat terselenggara dengan baik. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri memiliki persiapan sekitar 11 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Waktu yang di berikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu di maksimalkan mulai dari persiapan sarana dan prasarana sampai pada bagian sosialisasi kepada masyarakat. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah waktu yang cukup panjang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan seharusnya mereka mampu memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Dari 11 bulan waktu yang diberikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu, tahapan tersebut di rencanakan secara matang agar segala kekurangan dalam setiap program bisa tersusun dengan baik dan bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam mempersiapkan kegiatan pemilu kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara hampir tidak pernah sepi, dimana banyak anggota KPU yang bekerja untuk mempersiapkan berbagai hal yang mendukung kegiatan pemilu.KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga selalu berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk melaporkan segala bentuk program yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar meminimalisir kecurangan pemilu. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengunjungi sekolah serta universitas di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjalankan salah satu program mereka yaitu kegiatan sosialisasi pendidikan politik. Ini merupakan upaya yang terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar siswa dan siswi yang baru berusia 17 Tahun agar mereka mendapatkan bekal untuk bisa memberikan suara mereka dan tidak melakukan tindakan golongan putih (Golput) sehingga target yang di tetapkan dapat tercapai. Tidak hanya sosialisasi di berbagai kecamatan dan sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyediakan tempat untuk sebuah program baru yang ada yaitu kelas pemilu dimana kelas pemilu ini di adakan di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memang sudah menyiapkan segala tempat yang akan di gunakan untuk program sosialisasi dan program kelas pemilu demi kelancaran dari pesta demokrasi yang di adakan setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan sosialisasi memang tidak semua merata ke seluruh SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini di karena jumlah sekolah yang banyak sehingga waktu yang di

berikan juga tidak cukup untuk mengunjungi semua sekolah yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Alokasi Sumber Daya

Dalam melaksanakan alokasi sumber daya, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara merancang dan menganalisis bagaimana masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, apa saja budaya yang biasa dilakukan masyarakat, mencari tahu pekerjaan mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tahu apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mensukseskan jalannya pesta demokrasi. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak. Menjelang dilaksanakannya pemilu tahun 2024, Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Purnomo, S. H. I memberikan bimbingan kepada anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekaligus menjelaskan berbagai peraturan serta program yang akan dilakukan agar pemilu ini dapat berjalan dengan baik. sehingga dapat menciptakan pemilu yang berjalan dengan lancar. Kabupaten Kutai Kartanegara bukan merupakan daerah yang kecil namun merupakan Kabupaten terbesar nomor 2 di Kalimantan timur sehingga sumber daya manusia merupakan hal penting yang bisa membuat pemilu berjalan dengan baik. Sumber daya yang ada bukan hanya yang bertugas di KPU saja namun KPPS dan PPK juga merupakan sumber daya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Kualitas SDM dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara benar-benar di jaga dengan baik agar penyelenggaraan pemilu tidak berjalan asal-asalan dan mampu menciptakan pemilu yang baik.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Kutai Kartanegara di dukung oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam masalah anggaran yang di tetapkan sebesar Rp. 45.926.688.000 dan di harapkan bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Anggaran tersebut di kelola oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan secara terperinci, namun dalam pelaksanaannya dana yang digunakan juga mengalami permasalahan atau kekurangan dana. Sehingga KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan subsidi silang dari lintas kegiatan guna menutupi segala kekurangan anggaran yang tersedia. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan anggaran sekitar Rp 2.000.000,00 pada setiap TPS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan diharapkan bahwa TPS tersebut di hias dengan baik agar para pemilih tertarik untuk datang dan memberikan suaranya dalam pesta demokrasi. Pengalokasian dana memang sangat penting dilakukan agar penggunaan anggaran tersebut dapat berjalan dengan efisien dan efektif dan dana yang di dikeluarkan juga bisa di awasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Dana atau anggaran yang digunakan harus mampu memberikan dampak yang baik kepada penyelenggaraan pemilu sehingga dana yang ada dapat di manfaatkan dengan seharusnya. Jika dana yang digunakan tidak berjalan dengan efektif dan efisien pasti penyelenggaraan pemilu akan terganggu dan akan menimbulkan suatu masalah. Sarana merupakan peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, dan computer. Sedangkan prasarana ialah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri memiliki jumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai dari ATK (Alat Tulis Kantor), gedung tempat melaksanakan kelas pemilu, gedung logistik, kendaraan untuk melakukan koordinasi dan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sehingga untuk mengenai sarana dan prasarana sendiri sudah cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kotak suara menjadi sebuah bagian yang cukup penting dan juga harus tersedia hingga ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun daerah terpencil juga banyak, dan hal ini juga membuat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan ketersediaan kotak suara sampai ke daerah terpencil. Dalam proses penyediaan kotak suara ini pasti memiliki sebuah hambatan yang terdapat dalam proses pengiriman ke

setiap TPS di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena juga menjadi bagian yang krusial dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan KPU juga selalu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana itu terpenuhi dengan baik.

Diantara berbagai sarana dan prasarana yang ada, KPU mempunyai sarpras yang cukup dari segi kekuatan, hal ini menandakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kekuatan yang besar, dan menurut penulis dapat menghasilkan kinerja yang cukup untuk dicapai tujuan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan peneliti ke kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menangani siklus administrasi dengan baik dan memberikan pelayanan yang prima.

3.2. Hambatan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Tentu terdapat kendala bagi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini merupakan ancaman yang datang dari luar dan perlu diidentifikasi. Dengan mengidentifikasi ancaman tersebut, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyusun strategi yang dapat mengendalikan strategi tersebut.

1. Akses yang sulit dijangkau

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.263 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 44 Kelurahan dan 193 Desa. Hal ini menandakan bahwa banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimana jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak menentu sehingga KPU Kabupaten Kutai Kartanegara harus bekerja lebih keras untuk bisa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa jarak merupakan hal yang cukup menjadi hambatan bagi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan program sosialisasi dengan tujuan agar banyak masyarakat yang mau ikut berperan aktif dalam pemilu sehingga jika jarak yang di tempuh jauh maka perlu upaya dan usaha yang lebih besar agar bisa sampai ke kecamatan tersebut. Jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa rata-rata perjalanan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara itu memerlukan waktu yang panjang dan harus melewati infrastruktur jalan yang tidak mudah untuk di lewati walaupun beberapa kecamatan lainnya juga ada yang infrastruktur jalannya yang bagus namun dengan jumlah kecamatan yang mencapai 18 kecamatan juga akan memerlukan waktu yang panjang.

2. Budaya Masyarakat

Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu masih sangat rendah, terutama ketika masyarakat kekurangan pelayanan sosial. Banyak masyarakat yang tidak menyekolahkan anak-anaknya sehingga kurang tertarik pada lembaga-lembaga demokrasi di kota tersebut. Hal inilah yang menjadi penghambat terbesar kinerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengedukasi masyarakat melalui dukungan masyarakat secara langsung. Budaya-budaya itulah yang membuat partisipasi pemilih pemula itu rendah karena hal itu juga yang membuat KPU Harus bekerja dengan keras untuk meyakinkan masyarakat khususnya remaja yang baru menginjak 17 tahun agar tidak termakan budaya-budaya buruk dan mulai sadar terhadap dunia politik. dapat disimpulkan bahwa para remaja tidak tertarik dalam dunia politik karena terlalu banyak hal yang merugikan masyarakat dan

negara sehingga itu tidak sesuai dengan amanat UUD yang seharusnya di jalnkan oleh para aktor politik.

3. Informasi Media Sosial yang Kurang Tersosialisasikan

Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri masih banyak kecamatan sampai desa yang akses internetnya belum memadai sehingga usah yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan konten-konten edukasi mengenai pemilu di media sosial belum bias terjangkau keseluruh lapisan masyarakat di Kukar. Walaupun media sosial merupakan sebuah kekuatan namun juga bisa menjadi kelemahan jika jaringan yang belum merata di setiap kecamatan yang ada sehingga harus ada upaya yang lebih kuat untuk menyampaikan informasi. Hal ini membuktikan bahwa pemerataan jaringan internet harus terus di tingkatkan agar segala hal yang membutuhkan jaringan internet agar informasi dapat di dapatkan oleh seluruh kalangan baik di kota maupun di daerah terpencil. Dari kendala-kendala diatas, maka saat ini KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sedang mengembangkan program-program yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, namun KPU Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sangat berhasil mengatasi dan mengelola kendala-kendala tersebut serta mengoptimalkan penyebaran informasi menjadi semenarik mungkin dan memungkinkan terjadinya interaksi dari sekolah, kantor , dan komunitas serta membuat kelas pemilu yang mengundang perwakilan sekolah serta kampus di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan suaranya saat pemilu.

3.3. Upaya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Paritipasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya dan berencana melaksanakan berbagai program untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar instansi pemerintah, termasuk , dan lembaga pendidikan. Banyak perbedaan antara KPU dan partai kecamatan dalam hal peningkatan tingkat partisipasi masyarakat. Hanya ada pengaturan sebelumnya. Konfirmasi permasalahan penyampaian dan kekurangan mengenai lembaga demokrasi yang dibutuhkan KPU akan dikomunikasikan kepada pihak kecamatan untuk dikomunikasikan langsung ke pemerintah daerah. Jika ada koordinasi yang langsung melibatkan pemangku kepentingan masyarakat, KPU sendirilah yang turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan desa. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Kukar diantaranya sebagai berikut:

1. Kelas Pemilu

Kelas Pemilu adalah sebuah program yang di buat oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wadah pembelajaran bagi para pemilih pemula untuk mempelajari tentang demokrasi. Program ini mengundang 10 perwakilan Siswa SMA dari semua kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan turut mengajak mahasiswa/I dari Universitas Kutai Kartanegara sebagai pembicara mengenai materi yang telah diberikan oleh KPU. Tujuan dari program ini adalah agar para perwakilan sekolah mampu melakukan sosialisasi di sekolah mereka masing masing dan mengajak para generasi z atau pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu bukan hanya iktu mencoblos namus juga ikut mempelajari ritme politik ayng ada di Indonesia

khususnya di Kabupaten Kukar. Program ini baru dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dimana sebelumnya mereka menggunakan program relawan demokrasi tetapi untuk tahun ini menggunakan kelas pemilu untuk lebih terfokus pada generasi z yang merupakan pemilih pemula agar mereka dapat memahami mengenai konsep demokrasi dan pemilu. Dalam hal ini kelas pemilu dapat dijadikan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Sosialisasi ke Sekolah dan Masyarakat

Proses yang dilakukan KPUD Kota Kendari untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula adalah kehumasan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Kutai Kartanegara serta hak dan tanggung jawab masyarakat sebagai peserta demokrasi. Proses sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kukar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mengedukasi mereka tentang proses pemilu. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di seluruh kecamatan di Kukar untuk memberikan materi politik menjelang pemilu tahun 2024.

3. Memanfaatkan Penggunaan Media Sosial

Jumlah pengguna media sosial meningkat pesat, dan sebagian besar pengguna media sosial adalah remaja berusia antara 12 sampai 30 tahun. Hal ini dapat menyebabkan informasi tersebar dengan sangat cepat ke semua kalangan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memanfaatkan hal tersebut dengan mengelola media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat dengan mengunggah dan mengunduh hal-hal menarik seputar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sangat bermanfaat bagi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa media sosial yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu seperti instagram, facebook, website KPU sehingga pemanfaatannya harus secara maksimal agar konten yang di berikan bisa membuat masyarakat tertarik dan membuat masyarakat mau berperan aktif dalam pemilu tahun 2024.

3.4. Analisis SWOT

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah banyak melakukan cara agar dapat mengenali isu strategi yang telah berkembang di masyarakat. pemetakan dari beberapa unsur berupa kekuatan (*stength*) dan kelemahan (*weakness*) merupakan suatu komponen yang dapat menganalisis internal KPU Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri. Sedangkan unsur lainnya berupa peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threat*) berupa komponen untuk menganalisis eksternal dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri. Untuk menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, hasil dari beberapa elemen tersebut akan diubah menjadi rumusan. Untuk memastikan pemilu yang LUBER dan JURDIL, KPU diharapkan dapat menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

1. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal di buat guna memperoleh identifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Kekuatan (*Strength*)

Untuk mencapai misi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, faktor Strength merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Ini berarti bahwa faktor kekuatan dapat dikendalikan secara penuh tanpa terpengaruh oleh faktor lain, yang terdiri dari KPU Memiliki Kelas Pemilu, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Regulasi, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Memiliki Akun Media Sosial, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Memiliki Kepercayaan Masyarakat

b. Kelemahan (*Weakness*)

Sebagai lembaga pemilihan umum independen, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kelemahan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kelemahan ini berasal dari dalam KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, dan dapat menghambat upaya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya para pemilih pemula, yakni akomodasi, sikap apatis.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal berikut digunakan dalam mengidentifikasi sebuah peluang dan ancaman dalam KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Peluang (*Opportunity*)

Untuk memenuhi kebutuhan lapangan, organisasi harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan menekan kelemahan mereka. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu organisasi yang dapat memberikan peluang untuk menerapkan rencana yang dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, khususnya pemilih pemula, yakni pemanfaatan Media Sosial dan Website KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan kerjasama dengan SMA dan Universitas di Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Ancaman (*Threat*)

Dalam upayanya untuk mencapai tujuan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Kukar, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi ancaman yang berasal dari luar dan perlu diidentifikasi. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat membuat strategi untuk mengendalikan ancaman setelah mengidentifikasi mereka.

Dalam hal ini, ada banyak faktor yang membuat masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada gilirannya menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah, yang pada gilirannya dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat politik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan pengamatan dan wawancara tentang lingkungan internal dan eksternal KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Tabel berikut menunjukkan beberapa elemen penting dari SWOT.

Tabel 3.1
Lingkungan Internal dan Eksternal KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

<i>Strenght (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki SDM, regulasi, akun medsos dan <i>website</i>	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki anggaran yang terbatas, sehingga sulit melaksanakan sosialisasi ke beberapa kecamatan di Kukar
<i>Opportunity (O)</i>	<i>Threat (T)</i>

Pemanfaatan Media Sosial dan Website KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan kerjasama dengan SMA dan Universitas di Kabupaten Kutai Kartanegara	Apatisme Masyarakat
--	---------------------

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Dalam penjelasan tabel 3.1 di atas maka sudah ditemukan beberapa indikator yang di dapatkan peneliti pada saat melaksanakan penelitian dari beberapa indikator di atas memiliki bukti fisik berupa dokumentasi yang berbentuk foto dan hasil wawancara.

Tabel 3.2
Model Analisis SWOT

	Opportunity (O)	Weakness (W)
Strength (S)	<i>Strength/Opportunity (S.O)</i>	<i>Strength/Threat (S.T)</i>
Weakness (W)	<i>Weakness/Opportunity (W.O)</i>	<i>Weakness/Threat (W.T)</i>

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Model analisis, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, dibuat untuk membantu peneliti mendefinisikan strategi yang dapat diberikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk digunakan sebagai inovasi. Komponen S.W.O.T dapat bekerja sama untuk membuat strategi baru, seperti:

1. Strength / Opportunity (S.O) digunakan untuk membuat sebuah keuntungan dari beberapa peluang yang ada sehingga dapat memanfaatkan beberapa kekuatan.
2. Strength / Threat (S.T) dipakai untuk meminimalisir dampak dari ancaman yang datang dari berbagai faktor
3. Weakness / Opportunity (W.O) memiliki tujuan untuk memperbaiki atau membenahi kelemahan internal dan nantinya dapat dimanfaatkan dari peluang yang berasal dari eksternal.
4. Weakness / Threat (W.T) dalam tahap tersebut strategi tersebut dapat mempertahankan apa yang diharapkan oleh organisasi dan mengurangi kelemahan dari internal dan menghindari ancaman eksternal.

Berikut merupakan strategi yang di gunakan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Kukar secara keseluruhan berdasarkan table SWOT berikut:

Tabel 3.3
Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partidipasi Pemilih Pmeula Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

	Opportunity (O)	Weakness (W)
Faktor Eksternal		

Faktor Internal

	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemanfaatan website KPU dan Media Sosial b) Bekerjasama dengan SMA dan Universitas di Kabupaten Kukar 	Apatisme Masyarakat
<i>Strenght (S)</i>	<i>Strenght/Opportunity (S.O)</i>	<i>Strenght/Threat (S.T)</i>
<ul style="list-style-type: none"> a) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki SDM b) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Regulasi c) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki akun media sosial dan website 	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun tugas-tugas KPUD Kota kendari sesuai UU yang berlaku b) Memaksimalkan pengelolaan media sosial dan website dalam penyebaran informasi c) mempererat hubungan korelasi antar instansi pendidikan yang ada 	Meningkatkan kualitas kinerja SDM melalui kelas pemilu
<i>Weakness (W)</i>	<i>Weakness/Opportunity (W.O)</i>	<i>Weakness/Threat (W.T)</i>
<ul style="list-style-type: none"> a) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki anggaran yang terbatas b) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesulitan untuk melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan di Kabupaten Kukar 	<ul style="list-style-type: none"> a) Menggunakan anggaran dengan melakukan kegiatan yang berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih pemula b) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu dan kegiatan KPU yang memenuhi kebutuhan masyarakat. c) Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat yang cukup sulit di jangkau 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan peran masyarakat terkhusus perjabat pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan KPU b) meningkatkan stabilitas informasi yang beredar masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan pada tabel dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh KPUD Kota Kendari untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Kendari diantaranya ialah :

1. Strategi S.O adalah hasil dari analisis kekuatan (S) dan peluang (O) dalam KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada tiga strategi yaitu Menyusun tugas-tugas dalam KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai UU yang berlaku, Memaksimalkan pengelolaan media sosial dan website dalam penyebaran informasi dan dalam mempermudah pelayanan publik dan mempererat hubungan korelasi antar instansi pendidikan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Strategi S.T adalah sebuah strategi yang dapat dihasilkan dari analisis kekuatan (S) dan ancaman (T) dalam KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. dalam analisis tersebut strateginya ialah Meningkatkan kualitas kinerja SDM dalam relawan demokrasi
3. Strategi W.O adalah strategi yang diperoleh dari hasil analisis kelemahan (W) dan peluang (O) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat tiga hasil strategi yaitu Meningkatkan pemanfaatan media sosial dan website KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu dan kegiatan KPU yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan peran kelas pemilu dalam peningkatan partisipasi masyarakat terkhusus pemilih pemula.
4. Strategi W.T adalah sebuah strategi yang dimana strategi ini hasil dari analisis antara kelemahan (W) dan ancaman (T) dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dimana ada dua strategi yaitu meningkatkan peran masyarakat terkhusus pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan KPU dan meningkatkan stabilitas informasi yang beredar masyarakat dan memberikan pengetahuan umum mengenai demokrasi dan pentingnya demokrasi.

Ada beberapa langkah strategis yang dapat dicapai melalui misi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan, profesionalitas, dan transparansi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai pemilih dan warga negara; dan
- c. Melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan amanat Undang-undang.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu, yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menekan angka golput, dan meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, mereka juga harus mengajarkan pemilih pemula tentang tata cara pemilihan dan hak pilih mereka, sehingga mereka tidak memilih karena tidak tahu cara memilih.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kutai Kartanegara telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan beberapa rekomendasi bagi KPU Kutai Kartanegara untuk meningkatkan efektivitas strategi mereka dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Penelitian Dewi Sri Lestari (2019), Roro Ayu Wulansari (2023), Deny Ardiansyah (2022), Rizki Kurniawan, dkk. (2023), Zakiruddin dan Lestari (2023), Dila Novita, dkk. (2023), Megawati dan Andi Tenri (2020), Gracella, dkk. (2024), Yohana Simbolon (2019), dan Rosana dan Data (2024) menunjukkan bahwa strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula antara lain penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, sosialisasi dan pendidikan pemilih yang gencar dan

berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pemilih pemula., inovasi dan kreativitas dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. pelibatan pemilih pemula dalam proses penyelenggaraan pemilu. Melalui analisis SWOT yang telah dilaksanakan pula, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi bagi KPU Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 yaitu dengan (a)Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih; (b)Meningkatkan kualitas konten sosialisasi dan pendidikan pemilih agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh pemilih pemula; (c)Memanfaatkan media sosial secara lebih optimal untuk menjangkau pemilih pemula; (d)Melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan dan minat pemilih pemula sehingga strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat lebih tepat sasaran; dan (e)Mengembangkan program-program inovatif dan kreatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

IV. KESIMPULAN

Sehubungan dengan hasil dan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengikuti program yang disusun oleh KPU Pusat dan Provinsi, sehingga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan daerah dan lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Kukar, peneliti melihat beberapa strategi, termasuk pembuatan sasaran jangka panjang, proses pemilihan tindakan, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kabupaten Kukar banyak melakukan perencanaan dalam mengembangkan dan mencapai sasaran jangka panjang KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk sosialisasi di sekolah-sekolah, pembentukan Kelas pemilu, dan penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Salah satu tindakan yang dipilih oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melaksanakan program Kelas Pemilu. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan materi-materi mengenai demokrasi dan politik kepada para pemilih pemula agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi. Dalam upayanya untuk mencapai tujuan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Kukar, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi ancaman yang berasal dari luar dan perlu diidentifikasi. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat membuat strategi untuk mengendalikan ancaman setelah mengidentifikasi ancaman tersebut. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian tujuan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk memiliki ideologi atau pandangan politik sendiri, terpengaruh oleh opini publik yang tersebar luas, terlalu menelan informasi yang tidak jelas asal usulnya, mendapatkan berita hoax, kekurangan dana, kurangnya pengetahuan politik, kurangnya pendidikan dasar tentang demokrasi, telah dikecewakan oleh sistem politik, dan sulit untuk menyebarkan informasi. **Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. **Arah Masa Depan Penelitian:** Peneliti menyadari masih belum terjangkaunya objek penelitian serupa di kecamatan lain di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga ke depannya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada kecamatan lainnya yang berkaitan dengan strategi terhadap peningkatan pemilih pada kategori lainnya dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi

peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Deny. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020.
- Gracella, E. F., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus : Kecamatan Kuta Selatan, Badung). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 65–76. <https://doi.org/10.61292/shkr.121>
- Lestari, Dewi S. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.
- Megawati, M., & Padang, A. T. (2020). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA. *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH*, 1(3), 522-532. Dikutip dari <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Siyasatuna/Article/View/19530>
- Novita, D., Suryani, E., Morlian, A., Widiastuti, M., & Fadhilah, F. (2020). Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial pada Pemilihan Umum 2019. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 159-176.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rizki Kurniawan, M., Erawati, D., Setiawan, H., & Harmain, H. (2023). Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 1375–1390. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6206>
- Rosana Febryanti Putri, & Data Wardana. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak 2024. *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 160–166. Diambil dari <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/795>
- Simbolon, Yohana. (2019). Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Commed : Jurnal Komunikasi dan Media*. 4(1), 16-32.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Wulansari, Roro A. (2023). Strategi KPU Kabupaten Pringsewu Dalam Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024.

Zakiruddin, M. A. (2023). Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 8(1), 107-116.

